



DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIS JENDERAL

PENGUMUMAN

NOMOR: 06 /KP.02.01/II/2023

TENTANG

MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DENGAN CAT UNTUK SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/275/M.SM.01.00/2023 perihal Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT untuk Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2022 tanggal 8 Februari 2023, dengan ini kami sampaikan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan PPPK tenaga teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tahun anggaran 2022 sebagaimana terlampir agar pelamar dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam mengikuti ujian.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 16 Februari 2023

Ketua Panitia Seleksi PPPK
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional,



Syachriyal E. Siregar, S.E.
Mayor Jenderal TNI

**DAFTAR MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DENGAN CAT
 UNTUK SELEKSI PENGADAAN PPPK TENAGA TEKNIS SEKRETARIAT JENDERAL
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
1	2	3
1.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1. Pengetahuan substansi kebijakan; 2. Metode riset; 3. Teknik dan analisa kebijakan; 4. Penyusunan saran kebijakan dan kemampuan menulis dan publikasi; 5. Komunikasi dan konsultasi publik serta membangun jejaring kerjasama; 6. Pengetahuan umum tentang bidang pekerjaan serta regulasi dan legislasi.
2.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1. Arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur dalam perspektif rencana pembangunan nasional; 2. Kebijakan pembinaan jabatan fungsional Analisis SDM Aparatur. Kemampuan Khusus: 1. Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara; 2. Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM strategik di sektor publik; 3. Kerangka kerja dan implementasi <i>Human Capital Management</i> di sektor publik; 4. Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis kompetensi di sektor publik; 5. Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis talenta di sektor publik; 6. Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan kelembagaan organisasi di sektor publik; 7. Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan tatalaksana di sektor publik; 8. Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan reformasi birokrasi dan pengelolaan zona integritas di sektor publik; 9. Kerangka kerja proses dan analisis pengembangan kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur di sektor publik; 10. Kerangka kerja standar dan proses pengelolaan pelayanan publik di sektor publik.
3.	Arsiparis Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1. Pengantar kearsipan; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. UU Nomor 43 Tahun 2009 dan PP Nomor 28 Tahun 2012. Kompetensi Khusus: 1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 48 Tahun 2014; 2. Penggunaan dan pemeliharaan; 3. Pembinaan kearsipan: perlindungan dan penyelamatan arsip; 4. Pembinaan kearsipan: pengawasan kearsipan;

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengelolaan arsip dinamis: penyusutan arsip; 6. Pengelolaan arsip statis: autentikasi arsip; 7. Pengelolaan arsip statis: pengolahan arsip statis; 8. Pengelolaan arsip statis: preservasi arsip; 9. Pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi: publikasi arsip melalui JIKN.
4.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa; 2. Penyusunan spesifikasi teknis dan KAK; 3. Penyusunan perkiraan harga; 4. Reviu terhadap dokumen persiapan pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk pekerjaan dengan proses pengadaan barang/jasa yang sederhana; 5. Penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada pengadaan langsung dan tender cepat; 6. Evaluasi penawaran dan penilaian kualifikasi pada pengadaan langsung; 7. Evaluasi penawaran harga terendah sistem gugur; 8. Negosiasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah mengacu pada HPS dan standar harga/biaya; 9. Pengadaan barang/jasa secara <i>E-Purchasing</i> dan pembelian melalui toko daring; 10. Melakukan perumusan kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK); 11. Melakukan pengendalian pelaksanaan kontak pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk pekerjaan sederhana dan banyak tersedia di pasar; 12. Melakukan pekerjaan serah terima hasil pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan sederhana dan banyak tersedia di pasar; 13. Melakukan pekerjaan evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa Pemerintah; 14. Perencanaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola; 15. Persiapan pengadaan barang/jasa secara Swakelola; 16. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola; 17. Pengawasan barang/jasa secara Swakelola.
5.	Perencana Ahli Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi ekonomi; 2. Materi perencanaan; 3. Materi sosial; 4. Materi Spasial.
6.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	<p>Kompetensi Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup humas; 2. Etika kehumasan. <hr/> <p>Kompetensi Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen isu; 2. Manajemen komunikasi; 3. Karakteristik media; 4. Media baru; 5. Komunikasi massa; 6. Publisitas; 7. Penulisan kehumasan; 8. Media massa; 9. Kegiatan-kegiatan humas; 10. Komunikasi organisasi; 11. Komunikasi interpersonal; 12. Teori komunikasi; 13. Model komunikasi;

1	2	3
		14. Metode penelitian komunikasi; 15. Audit komunikasi.
7.	Pranata Komputer Ahli Pertama	1. Konsep dasar manajemen layanan TI, manajemen katalog dan operasional layanan TI; 2. Konsep basis data, konsep taksonomi, desain basis data, penerapan taksonomi, penerapan data ingestion, dan implementasi basis data; 3. Ruang lingkup, kriteria dan tujuan audit TI, perencanaan audit, kerangka kerja sistematis (<i>best practice</i>), proses dan evaluasi audit TI; 4. Konsep, rancangan, implementasi, evaluasi dan monitoring sistem jaringan; 5. Komponen dan fungsi, pengaturan akses, pemasangan, pengujian, deteksi, perbaikan, pemeliharaan, serta pengembangan infrastruktur TI; 6. Konsep dasar analisis kebutuhan sistem informasi, perancangan dan implementasi sistem informasi; 7. Teknik pengolahan data; 8. Konsep dan implementasi sistem informasi geografis dan multimedia.



Ketua Panitia Seleksi PPPK
 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Syachriyal E. Siregar, S.E.
 Mayor Jenderal TNI